

HISTORY OF PUBLIC SCHOOL EDUCATION (VOLKSCHOOL) IN THE DUTCH COLONIAL PERIOD IN ACEH

Fika Ardhillah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: fikaardhillah17@gmail.com

Ajidar Matsyah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: ajidar.matsyah@ar-raniry.ac.id

Muhammad Yunus Ahmad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: muhammadyunusahmad08@gmail.com

Abstract

One of the three-year Dutch schools in Aceh is called People's School (*Volkschool*). Starting with the few Acehnese who are aware that there were once schools built by Dutch colonialists in Aceh before the foundation of schools as they are now. Because the history of the People's School (*Volkschool*) is not widely known among Acehnese, it makes for a very fascinating study subject. The purpose of this study is to understand more about how the People's School (*Volkschool*) in Aceh was founded and how its educational system operated during the Dutch colonial era. By using library research methods (Library Research) and oral sources (interviews). This study uses historical research methods, namely heuristics (data collection), source criticism (data verification), interpretation (data analysis), and historiography. The results showed that the first People's school (*Volkschool*) was formed in Aceh on December 30, 1907 in Ulee Lheu. This was motivated by the Dutch goal of realizing the desire of the Dutch East Indies government to spread education as widely as possible at the lowest possible cost. the three years of instruction at the People's School (*Volkschool*). The reading, writing, and math components of the *Volkschool* curriculum are its format. The Dutch colonialists paid for the classroom supplies, including slate and grip writing implements. Parents of pupils are required to cover expenses ranging from 10 cents to 15 cents. No fees were ever taken from pupils, not even in the early years of the school's existence or towards the conclusion of the colonial era. The Acehnese may be employed by the Dutch colonialists even though the wages were extremely poor after receiving an education at this institution. Although the Dutch colonialists initially forced the people of Aceh to send their children to the People's School (*Volkschool*), this compulsion ultimately led to exceptional outcomes. Where the people of Aceh may produce an enlightened generation like the one we have today and are no longer illiterate in Latin.

Keywords: *History; education; volkschool; Aceh*

SEJARAH PENDIDIKAN SEKOLAH RAKYAT (VOLKSCHOOL) PADA MASA KOLONIAL BELANDA DI ACEH

Abstrak

Sekolah Rakyat (Volkschool) merupakan salah satu sekolah Belanda yang terdapat di Aceh dengan masa pendidikannya tiga tahun. Berangkat dari masih sedikit masyarakat Aceh yang mengetahui bahwa sebelum berdirinya sekolah-sekolah di Aceh seperti pada masa sekarang ini, dahulu berdiri sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda. Sejarah Sekolah Rakyat (Volkschool) ini sangat menarik dijadikan kajian karena ini tidak terlalu diketahui oleh masyarakat Aceh. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah terbentuknya Sekolah Rakyat (Volkschool) dan bagaimana proses pembelajaran di Sekolah Rakyat (Volkschool) pada masa kolonial Belanda di Aceh. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan sumber lisan (wawancara). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (verifikasi data), interpretasi (analisis data), dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya sekolah Rakyat (Volkschool) pertama di Aceh pada tanggal 30 Desember 1907 di Ulee Lheu. Dilatarbelakangi oleh tujuan Belanda untuk mewujudkan hasrat pemerintah Hindia Belanda dalam menyebarkan pendidikan seluas mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat (Volkschool) selama 3 tahun. Bentuk kurikulum Sekolah Rakyat (Volkschool) adalah membaca, menulis, dan berhitung. Adapun perlengkapan sekolah ditanggung oleh kolonial Belanda seperti alat tulis sabak dan grip. Biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua murid berkisar 10 sampai 15 sen. Bahkan pada masa awal didirikan sekolah dan pada masa akhir penjahannya tidak dipungut biaya apapun dari muridnya. Setelah mendapatkan pendidikan di lembaga ini, warga Aceh dapat dipekerjakan oleh kolonial Belanda walaupun dengan upah yang sangat rendah. Meskipun pada awalnya masyarakat Aceh secara terpaksa menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat (Volkschool) yang didirikan oleh kolonial Belanda, namun pada akhirnya keterpaksaan tersebut juga membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Dimana rakyat Aceh tidak lagi buta huruf Latin dan mampu melahirkan generasi yang cerdas seperti sekarang ini.

Kata kunci: *Sejarah; pendidikan; volkschool; Aceh*

Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu daerah yang menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia, baik itu di masa lalu, sekarang, hingga di hari yang akan datang. Karena Aceh secara historis pernah menjadi jalur perdagangan internasional dan tempat bertemunya bangsa dan peradaban. Perkembangan sejarah dan peradaban masyarakat Aceh juga menjadi fokus perhatian para sejarawan, karena Aceh memiliki

keunikan tersendiri. Dimana pada awal perkembangan peradaban, Aceh telah menjadi jalur perdagangan internasional sebagai pelabuhan dan tempat terjadinya interaksi antar negara (Usman 2003).

Pendidikan adalah suatu aspek yang penting dalam kehidupan seseorang manusia, karena dengan adanya pendidikan memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Pendidikan merupakan

suatu sistem karena di dalamnya terdapat berbagai komponen seperti tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode, atau media pendidikan, dan lingkungan pendidikan (Yulasri 2016). Pendidikan pada umumnya memberi makna pada kehidupan. Pendidikan mencakup semua pengalaman belajar yang terjadi sepanjang hidup di semua lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang (Saidah 2016).

Ada dua jenis pendidikan, yaitu terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal ialah suatu pendidikan yang diperoleh melalui partisipasinya dalam sebuah kegiatan atau program pendidikan yang telah terstruktur dan terencana yang disediakan oleh instansi pemerintah seperti sekolah atau universitas. Sedangkan pendidikan nonformal adalah sarana pendidikan yang tidak termasuk golongan formal (Mariono and Suryawan 2020).

Belanda merupakan bangsa terlama yang menjajah Indonesia salah satunya yaitu di Aceh (Madjid 2013). Secara resmi, Belanda hadir di Aceh pada tahun 1873 sekaligus menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh. Perang Belanda di Aceh sangat lama yaitu sejak tahun 1873 sampai dengan 1942, dan

ada juga sejarawan yang menyebutkan sampai dengan 1904, serta ada juga yang menyebutkan sampai dengan 1912 (Sudirman 2013).

Saat Belanda datang ke Aceh, sudah terdapat banyak sekolah yang tersebar di negeri (Hurgronje 1906). Namun, di Aceh sendiri belum berdiri sekolah umum, melainkan sekolah agama atau lembaga pendidikan dayah. Dimana Islam dulunya berpusat di Aceh dan dengan adanya islamisasi, maka pendidikan Islam pun mulai berkembang. Pendidikan formal tingkat dasar sering diberikan di setiap Meunasah atau Mesjid (Desa) *Gampong*. Anak-anak dapat bersekolah di Sekolah Menengah Pertama, Rangkang dan Sekolah Dayah untuk Pendidikan Menengah Atas untuk menyelesaikan studi mereka.

Setelah kolonial Belanda berhasil menguasai wilayah Aceh, pemerintah kolonial Belanda pun tampak tertarik pada pendidikan rakyat yang tujuannya tidak terlepas dari penjajahan. Oleh karena itu, dari tahun 1907 ada inisiatif untuk mendirikan sekolah desa (*Volkscholen*) yang pada mulanya hanya ada satu di Aceh Besar kemudian dari tahun ke tahun jumlahnya berangsur-angsur bertambah dan menyebar ke seluruh Aceh.

Pada akhir tahun 1907, pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya pendidikan dasar (pendidikan rakyat) yang merupakan bukti dari datangnya perdamaian dan kegigihan masyarakat Aceh. Sehingga, dengan berkembangnya perdamaian orang-orang semakin percaya bahwa kolonial Belanda bermaksud untuk mengajari kaum muda beberapa pengetahuan dasar yang penting dalam perjuangan untuk kehidupan sehari-hari. Pendirian sekolah oleh pemerintah Belanda di Aceh adalah awal dari kebangkitan pendidikan (modernisasi) di wilayah tersebut.

Salah satu lembaga pendidikan yang didirikan oleh kolonial Belanda di Aceh yaitu Sekolah Rakyat (*Volkschool*). Sekolah Rakyat (*Volkschool*) merupakan sekolah tingkat dasar pada zaman penjajahan Belanda. Dimana sebelum berdirinya sekolah-sekolah seperti sekarang ini, dulunya terdapat sekolah yang didirikan oleh Belanda di Aceh. Dengan didirikan sekolah rakyat oleh Belanda, sehingga masyarakat pada masa itu tidak buta huruf Latin, minimal sekali masyarakat pada saat itu bisa membaca, menulis dan berhitung, kemampuan dan materi yang diajarkan juga sesuai dengan tingkatan kelas belajar mereka.

Namun, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui akan hal itu. Dikarenakan orang-orang yang hidup pada masa Belanda sudah tidak ada lagi. Hanya satu atau dua orang lagi yang masih hidup dan masih teringat ataupun terekam di memori mereka mengenai sejarah tersebut sehingga bisa diceritakan kembali, diteliti lebih mendalam mengenai hal ini, bahkan termasuk juga bagian yang sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat dewasa ini ataupun para penuntut ilmu pada masa sekarang mengenai awal mula masyarakat Aceh ini mendapatkan pendidikan.

Betapa pentingnya sejarah ini diangkat kembali agar kita semua tidak luput dan melupakan sejarah yang bisa dikatakan sangat berharga karena mewarisi ilmu pengetahuan yang sudah berlanjut dalam jangka waktu yang sangat lama hingga sekarang ini. Walaupun di zaman ini serba canggih, penuh dengan teknologi, menggunakan berbagai media dan metode, kurikulum dan lain sebagainya, namun hal ini tidak akan terjadi tanpa ada dasar pendidikan yang mewarisi sampai terjadi seperti sekarang ini.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka metode yang digunakan

adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan sumber lisan (wawancara). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (verifikasi data), interpretasi (analisis data), dan historiografi. Semua data yang dikumpulkan akan dianalisis sehingga permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan baik.

Pembahasan

Pada masa kerajaan Aceh, pendidikan di Aceh dilaksanakan di Meunasah- Meunasah dan Dayah-Dayah dari tingkatan rendah hingga tingkatan yang lebih tinggi. Peperangan yang terjal sudah menghancurkan lembaga-lembaga ini dan kehilangan guru serta siswa-siswanya. Sehabis Belanda mulai menguasai daerah Aceh, mereka mempraktikkan sistem pendidikan Barat di Aceh sebagaimana yang sudah diterapkan di bagian lain di Hindia Belanda (Ismail 1995).

Selaku akibat dari proses politik, Aceh menjadi salah satu daerah di Nusantara yang menerima sistem pendidikan paling lambat dari pemerintah Hindia Belanda kepada masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, beberapa penelitian komparatif masih

diperlukan. Pendidikan ini baru diperkenalkan kepada masyarakat Aceh oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20, dan pada awalnya terbatas pada anak-anak bangsawan dan para anak *Uleebalang*. Meskipun upaya perdamaian telah dimulai, perang antara Aceh dan penjajah Belanda masih berlangsung saat itu (Ibrahim 1981). Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda tidak serta-merta dapat menerapkan sistem pendidikan yang tertib dan teratur pada masa yang berbahaya ini. Upaya untuk mengembangkan dan memperkuat sistem pendidikan ini tidak dapat dimulai sampai perlawanan Aceh terhadap penjajah Belanda mereda pada akhir tahun 1920-an.

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari politik neokolonial yang dimulai pada awal abad ke-20 dan sering disebut sebagai politik etis. Kebijakan tersebut didasarkan pada konsep pemerintah Hindia Belanda tentang "kewajiban moral dan hutang budi" (*Een Eereschuld*) kepada koloni. Pada bulan September 1901, pidato tahunan Ratu Wilhelmina dari takhta menandai dimulainya era baru dalam politik etis dengan trilogi kebijakan yang berpusat pada pendidikan (perbaikan dan pembangunan di bidang pendidikan),

irigasi (perbaikan dan pembangunan di bidang pertanian), dan emigrasi (proses peningkatan di bidang pertanian dan populasi) (Munawiah 2007).

Sejarah Terbentuknya Sekolah Rakyat (*Volkschool*) di Aceh

Sekolah Rakyat (*Volkschool*) adalah salah satu sekolah Belanda di Aceh yang menawarkan pendidikan tiga tahun. Sekolah Rakyat yang disebut juga dengan *Volkschool* didirikan oleh masyarakat secara gotong royong atas prakarsa desa dan diawasi oleh Belanda, sedangkan guru-gurunya adalah warga yang berasal dari masyarakat Aceh dan dikenal dengan sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat (*Volkschool*) ini didirikan pada tanggal 30 Desember 1907 oleh Van Daalen, Gubernur Militer/Sipil Aceh. Dengan jumlah siswa 38 orang, Sekolah Rakyat pertama didirikan di Aceh Besar, Ulee Lheu, yang semula bernama Sikula Mukim. Kemudian, pada tanggal 4 Januari 1908, dibuka lagi sekolah serupa di Desa Lam Lagang (Aceh Besar), dengan jumlah siswa awal 35 orang. Selanjutnya di Peukan Bada distrik VI Mukim dalam Sagi XXV Mukim Aceh Besar. Di luar Aceh Besar sekolah yang seragam dibuka di Bireuen serta di Lhoksukon di bawah

pemerintahan Gubernur Swart (yang mengambil alih Gubernur Van Daalen pada bertepatan pada 10 Juni 1908), sekolah- sekolah rakyat ini terus diperkembang (Ibrahim 1981).

Di bawah pemerintahan Gubernur Swart, jumlah sekolah rakyat di wilayah Aceh Besar bertambah menjadi 21, pada akhir tahun 1909 jumlahnya meningkat menjadi 51 dengan 2.009 murid, tanpa murid perempuan. Perkembangan sekolah semakin meningkat dengan adanya keputusan Gubernur Aceh yang menyisihkan beberapa dana tertentu disetiap tahunnya dengan tujuan memperbanyak sekolah. Jumlah ini bertambah menjadi 85 unit pada Desember 1910, yang dapat dibagi menjadi empat divisi: Afdeeling Noordkust van Atjeh (Aceh Utara) 11 unit, Afdeeling Oordkust van Atjeh (Aceh Timur) 9 unit, Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat) 8 unit, dan Afdeeling Alasluden (dasar) 4 buah.

Pada tahun 1910 pula didirikan sekolah awal untuk anak perempuan di Ulee Lheue bertepatan 09 Mei 1910 atas usaha swasta, sebaliknya yang kedua dibuka di 18 Lamreueng bertepatan pada 9 Oktober 1913, serta yang ketiga bertepatan pada 1 Desember tahun yang sama di Kutaraja. Semenjak itu jumlah

DeescheLa tumbuh jadi 20 buah dengan nyaris 1. 200 orang murid (Ibrahim 1981).

Menurut Kolonial Verslag, ada 151 sekolah di Aceh pada akhir tahun 1913 dengan 7.000 siswa, termasuk 6 sekolah untuk perempuan dengan 240 siswa. Akhir tahun 1914 telah mencapai 165 buah sekolah dengan murid lebih dari 8.200 orang tercantum, 6 sekolah untuk wanita dengan jumlah murid 28 orang serta di akhir tahun 1915 jumlah ini bertambah menjad 184 sekolah dengan murid 10.700 sekolah wanita dengan jumlah 418 orang. Tahun 1916 rmasuk 6 jumlah meningkat lagi jadi 196 sekolah dengan murid 11.300 orang tercantum 9 sekolah wanita dengan murid 704 orang.

Akhir tahun 1918 jumlah sekolah rakyat (*Volkschool*) di wilayah Aceh sudah mencapai 250 buah dengan jumlah murid 14.751 tercantum 20 sekolah wanita dengan murid 1321 sedangkan guru yang bekerja 490 orang, 2 serta satu guru untuk 30 orang murid. Mayoritas guru ini adalah pendatang, terutama Mandailing (Tapanuli) dan Minangkabau, sedangkan etnis Aceh sangat kecil. Tahun 1919 Sekolah Rakyat bertambah jadi 258 buah dengan jumlah murid 15.476 orang, di dalamnya

termasuk 20 buah sekolah perempuan dengan murid 1. 161 orang.

Pada akhir tahun 1920 Aceh memiliki 266 sekolah umum, 527 guru, dan 16.435 siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya pada akhir tahun 1921 jumlahnya menjadi 275 buah, dengan jumlah guru 539 orang serta muridnya 16. 674, orang, yang terdiri dari 14. 352 pria serta 2. 322 wanita. Jumlah ini bertambah lagi menjadi 283 sekolah dengan gurunya 553 orang serta murid jadi 16. 991 orang, pria 14. 636 orang serta wanita 2. 355 orang di akhir tahun 1922 dengan masa belajar 3 tahun.

Apabila dicermati, walaupun tahun-tahun awal tidak memberikan harapan majunya pendidikan modern ini, pada tahun 1935 jumlah murid *Volkschool* sudah bertambah sampai lebih dari 33. 000 murid, dalam perbandingannya sedikit lebih besar dari di Jawa ataupun daerah-daerah lain di Indonesia. Setelah itu, pada akhir masa jabatan Gubernur van Aken tahun 1936, jumlah sekolah tersebut di seluruh Aceh telah mencapai 321 buah dengan total 33. 550 murid, antara lain 9. 871 murid wanita. Pada tahun 1938, *Volkschool* di seluruh Aceh sebanyak 328 buah, dan tahun 1939 telah menggapai 438

sekolah, gurunya sekitar 600 orang dengan jumlah murid sekitar 36.000 orang.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Belanda adalah masalah bahasa, sebab pada biasanya guru-guru pendatang tidak mengerti bahasa Aceh, sedangkan Sekolah Rakyat ini khususnya yang terletak di desa tidak paham bahasa Melayu yang sudah dijadikan selaku bahasa pengantar oleh pemerintah Belanda. Alasan ini pula yang mengurangi minat para murid untuk bersekolah. Ditambah lagi dengan isu *teungku-teungku* atau tokoh agama (ulama) yang biasanya menentang keberadaan sekolah buatan Belanda di Aceh (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984).

Faktor lainnya adalah orang tua siswa, khususnya ibu-ibu yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dikelola oleh orang-orang kafir, dan berkembangnya rumor bahwa jika mereka belajar menulis huruf Latin, mereka akan kehilangan tangan kanannya di akhirat. Sekolah mereka dikenal sebagai *desya*, yang diterjemahkan menjadi "sekolah dosa." Para ibu tampaknya lebih suka anak-anak mereka tinggal di rumah untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan

bertani. Mereka memberikan pendidikan anak kepada *teungku*, atau ulama, yang menerima pendidikan agama baik sehari-hari atau di meunasah, atau pesantren (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984).

Faktor-Faktor Terbentuknya Sekolah Rakyat (*Volkschool*)

Ada dua alasan utama mengapa pemerintah Hindia Belanda merasa harus mengintegrasikan sistem pendidikan Barat ke wilayah Aceh. *Pertama*, perubahan sistem politik kolonial Belanda dari abad ke-19 ke abad ke-20 sejalan dengan visi politik etis yang mereka kejar, salah satunya adalah untuk mendapatkan pegawai administrasi yang terampil sesuai standar.

Para pegawai pribumi ini berusaha menjadi pejabat yang efisien dalam melancarkan sistem ekonomi dan struktur birokrasi mereka. Akibat kepentingan tersebut, pemerintah kolonial Belanda berupaya memperbaiki sistem pendidikan bagi penduduk lokal yang sebelumnya terbatas (Ibrahim 1981).

Kedua, munculnya kelompok baru dalam pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh seorang orientalis bernama C. Snouck Hurgronje yang

terkenal dengan konsep politik asosiasinya. Kelompok ini meyakini bahwa perlawanan bersenjata rakyat Indonesia adalah salah satunya, khususnya perlawanan yang diberikan oleh masyarakat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda, yang terutama dilatarbelakangi oleh sistem nilai Islam. Pertentangan-pertentangan tersebut hanya dapat diselesaikan atau dikurangi jika para bangsawan atau pemuka adat setempat, dalam hal ini para *Uleebalang* Aceh, ditarik ke dalam orbit budaya dan sistem nilai mereka (sistem nilai Barat atau Belanda) (Ibrahim 1981).

Alhasil, kelompok tersebut mewakili keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menciptakan kelompok elit baru yang dibina dan dididik dalam budaya dan sistem nilai mereka. Dengan sistem ini, diharapkan mereka yang dibina dan dididik tidak lagi mengejar seruan para pemuka Islam untuk tetap menjadi orang Belanda, sehingga mengurangi pengaruh sistem nilai dalam Islam seperti yang digaungkan oleh Ulama, seperti yang terjadi di Aceh.

Tujuan Didirikan Sekolah Rakyat (*Volkschool*)

Sekolah Rakyat (*Volkschool*) didirikan pada tahun 1907 untuk memenuhi keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menyebarkan pendidikan seluas-luasnya dengan biaya semurah mungkin. Pendidikan rakyat menarik banyak perhatian pada awal abad kedua puluh, berkat kebangkitan Asia dan pendidikan yang lebih baik di koloni lain.

Di Aceh, sebagaimana di wilayah Indonesia lainnya, pemerintah kolonial Belanda menggunakan golongan bangsawan setempat sebagai perantara antara dirinya dengan rakyat, dalam hal ini melalui golongan *Uleebalang*. Alhasil, kelompok *Uleebalang* yang merupakan bangsawan Aceh pertama kali diperkenalkan dengan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda di Aceh. Dan itulah yang diinginkan oleh kelompok C. Snouck Hurgronje untuk dipisahkan dari para pemimpin agama (Ibrahim 1981).

Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda diperkenalkan kepada mereka pada tahun 1900 Masehi. Beberapa putra *Uleebalang* Aceh telah diikutsertakan dalam studi tahun itu di sebuah sekolah Belanda di Kutaraja. Setelah bersekolah di sekolah Belanda di Kutaraja, tiga putra *Uleebalang* dari Aceh Besar dikirim ke

Fort de Kock (sekarang dikenal sebagai Bukit Tinggi) oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bersekolah di sekolah guru. Kemudian, mulai tahun 1907 atau 1908 M dan berlangsung hingga tahun dua puluhan, banyak putra *Uleebalang* dikirim ke luar daerah Aceh untuk menempuh berbagai jenis pendidikan yang diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Yaitu diantaranya: *Hoofdenzoonschool* di Asahan, *OSVIA* di Bandung dan Serang, *Bestuurschool* di Batavia, dan *MOSVIA* di Madiun.

Namun berbeda dengan harapan pemerintah kolonial Belanda karena tidak semua yang dididik melalui sistem ini berhasil di tangan mereka. Beberapa putra *Uleebalang* Aceh yang telah mengenyam pendidikan ini selalu berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjadi tokoh yang memelopori munculnya paham kebangsaan di wilayah Aceh, sedangkan sebagian lainnya selalu bekerjasama dengan pimpinan instansi. Misalnya, sekitar tahun 1931, kelompok-kelompok menentang perubahan bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat Aceh (*Volkschool*) dari bahasa Melayu ke bahasa Aceh (Ibrahim 1981).

Van Mook, seorang tokoh konservatif di pemerintahan Hindia

Belanda, mengusulkan agar bahasa daerah dikembangkan kembali untuk merevitalisasi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Selanjutnya, Teuku Chiek Muhammad Thayeb dan Teuku Cut Nyak Areh, keduanya tokoh *Uleebalang*, telah terpilih menjadi anggota *Volksraad* untuk mewakili wilayah Aceh. Dapat dikatakan bahwa kelompok putra *Uleebalang* yang telah mencicipi sistem pendidikan pemerintah, khususnya rekan-rekan yang dididik di luar Aceh, telah berkembang menjadi kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Namun, ada sebagian yang selalu mengadvokasi kepentingan terbaik masyarakat (Ibrahim 1981).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperkokoh keutuhan dan solidaritas mereka dengan tujuan menolong masyarakat, sampai pada tahun 1916 M kelompok ini mendirikan sesuatu perkumpulan yang bernama Serikat Aceh (*Vereeniging Atjeh*) (Ibrahim 1981). Mereka menyatakan dalam perkumpulan ini bahwa tujuan organisasi mereka antara lain adalah memajukan pendidikan (baik pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda atau pendidikan agama, yang merupakan lembaga pendidikan tradisional untuk orang Aceh) kepada

para pemuda Aceh dan berusaha untuk menghilangkan beberapa kebiasaan yang mereka anggap membatasi.

Menurut beberapa informasi yang disampaikan, konsepsi C. Snouck Hurgronje bertujuan untuk mendidik sekelompok orang Aceh dengan tujuan menjauhkan atau memisahkan mereka dari kelompok lain. Namun, jika dilihat dalam kaitannya dengan Kebijakan Etis dan tujuan perluasan sistem pendidikan pemerintah, hal itu hampir tercapai. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.J. Piekaar (sekretaris residen terakhir pemerintah Hindia Belanda): “Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mendistribusikan pendidikan kepada pemuda Aceh dengan harapan dapat mengisi jabatan administratif dalam pemerintahan (Ibrahim 1981).

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda memberikan pendidikan dasar yang sangat terbatas di Aceh. Artinya, tidak seperti di Jawa, tidak semua jenis pendidikan tersedia di Aceh. Dalam hal ini di Aceh antara lain *Volkschool* (3 tahun studi), *Vervolgschool* (2 atau 3 tahun studi), *Meisieschool* (2 atau 3 tahun studi), *De2de klassescholen* (kelas 2 sekolah), *Inlandsche School*, *Europeesche*

Lagere School (7 tahun studi), *Hollandsch Indsche School* atau *H.I.S.* (7 tahun studi), *Hollandsch Chinesche School* atau *H.C.S.* (7 tahun studi). Tahun dan sekolah ini dirancang khusus untuk anak-anak Ambon yang pernah bertugas di militer Belanda), dan *Voorbereiden Onderwijs*, juga dikenal sebagai *Frobelschool* (semacam sekolah TK) (Ibrahim 1981).

Proses Pendidikan di Sekolah Rakyat (*Volkschool*)

Pada sekolah Rakyat *Volkschool* pengelolaan serta penggajian gurunya ditanggung oleh *Landschap* (Pemerintah Kerajaan). Pemerintah hanya mengadakan pengawasan lewat *School Opzleneer* (Pemilik Sekolah) mengenai materi serta kurikulumnya. Kurikulum pendidikan Sekolah Rakyat (*Volkschool*) dalam proses implementasi pendidikan menjadi wewenang mutlak pimpinan sekolah. Sekolah Rakyat tersebut masa ajarannya sepanjang tiga tahun. Membaca Aksara Latin dalam bahasa Aceh pada awalnya digunakan dalam kitab “*Doea Sila Yeue*” karya Nyak Cut, seorang putra *Uleebalang* di Aceh Besar yang dikirim oleh pemerintah Belanda untuk mengikuti *Kweekschool* di Bukit Tinggi, setelah itu ia menulis dalam huruf Latin dan arab, ejaan dalam kedua huruf, serta berhitung, pecahan sederhana,

latihan dialog atau percakapan, dan sedikit pengetahuan geografi tentang Hindia Belanda (Indonesia) (Ibrahim 1981).

Adapun alat tulis yang digunakan yaitu sabak dan grip. Sabak ialah tempat tulis atau buku tulis yang terbuat dari batu berbentuk papan tulis mini, sedangkan grip ialah alat tulis yang terbuat dari batu. Alat tulis tersebut dibagikan oleh pihak Belanda kepada murid-murid sekolah rakyat. Selain alat tulis, buku bacaan juga dibagikan seperti buku ABCD dan juga buku tentang bahasa Aceh yang tertulis di dalam buku tersebut seperti *Mak Bree Bu*, berarti ini juga termasuk metode belajar ejaan dikarenakan rata-rata muridnya masih buta huruf Latin dalam mengenal huruf abjad.¹

Sekolah Rakyat tersebut terdapat beberapa lokal atau ruangan. Dalam satu ruangan, terdiri dari dua kelas yaitu kelas satu dan dua kurang lebih sebanyak empat puluh orang. Satu meja terdiri dari empat orang dan dicampur antara laki-laki dan perempuan. Alat tulis dan buku pelajaran tersebut setiap hari disimpan di dalam meja dan tidak dibolehkan

untuk membawa pulang, karena kondisi murid pada saat itu bertempat tinggal jauh dari lingkungan sekolah, kemudian alat tempuh dengan berjalan kaki juga melewati jalan yang penuh rintangan bahkan harus menyeberangi sungai agar sampai ke sekolah, baik menggunakan perahu ataupun berenang.²

Biaya sekolah dibebankan kepada siswa dan harus dibayar oleh orang tua mereka. Mereka berkisar dari f.0.10 sampai f.015 (antara 10 dan 15 sen) per tahun. Dalam prakteknya, uang sekolah ini tidak dipungut di awal-awal sekolah, tetapi dipungut setelah itu, berkisar antara 5 sampai 10 sen saja (Ibrahim 1981). Apalagi pada masa akhir penjajahan Belanda, tidak dipungut bayaran apapun untuk murid- murid disebabkan keadaan negeri dalam kondisi darurat menjelang masuknya Jepang ke Aceh.³ Dapat disimpulkan bahwa bentuk kurikulum Sekolah Rakyat (*Volkschool*) ditekankan pada membaca, menulis, serta berhitung (Nasution 2011).

Adapun di *Volkschool* tiap hari dimulai pada jam 8 dan berakhir sampai jam 11, ataupun paling lambat jam 11.30,

¹ Hasil Wawancara dengan Ismail, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021.

² Hasil Wawancara dengan Saidah, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022.

³ Hasil Wawancara dengan Nyak Din, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022.

sedangkan pada hari Jumat serta hari Minggu dan pada hari-hari besar yang diresmikan oleh pemerintah, sekolah diliburkan serta pada bulan puasa, sebulan penuh diliburkan.⁴ Sehubungan dengan niat pemerintah untuk meramaikan sekolah umum, maka pemerintah mengerahkan pengawasnya dan meminta kepada *Uleebalang* yang ingin bekerjasama untuk memberikan semangat untuk memaksa orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Mereka yang tidak patuh didenda atau dihukum dengan bekerja di konstruksi jalan atau yang disebut Rodi. Akibatnya, jika tidak dibarengi dengan paksaan, sekolah-sekolah negeri mau tidak mau pada awalnya akan kosong. Agar sekolah-sekolah ini selalu dikunjungi siswa, dan *Uleebalang* dapat terus menekan orang tua siswa.

Oleh sebab khawatir terhadap sanksi yang diberikan oleh *Uleebalang*, hal ini membuat para orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang di laporkan oleh A. Vogel (Inspektur Pendidikan Bumi Putera) pada tahun 1919, pendidikan di Aceh pada awalnya

tidak berkembang secara normal, tetapi terpaksa karena masyarakat Aceh pada umumnya tidak menyukainya.

Masalah lain yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda dalam sistem pendidikan sekolah umum Aceh adalah niat pemerintah untuk mengganti bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah tersebut dengan bahasa Aceh. Van Mook (salah satu tokoh konservatif di pemerintahan Hindia Belanda yang menginginkan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia dihidupkan kembali, serta bahasa daerahnya). Sampai tahun 1931, pemerintah Belanda di Aceh menginginkan agar bahasa Aceh digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah umum.

Alasan lain mengapa pemerintah mendorong masyarakat Aceh untuk menggunakan bahasa Aceh, yaitu dengan menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar, siswa akan cepat memahami dan menguasai pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Orang-orang juga dapat membaca dan menulis dalam bahasa asli mereka menggunakan huruf Latin, menghidupkan kembali bahasa Aceh sebagai bahasa sastra.

⁴ Hasil Wawancara dengan Zainab, pada tanggal 19 Juli 2022.

Bahasa Melayu masih menjadi bahasa pengantar di daerah Gayo, Alas, Tamiang, dan Singkil di mana bahasa Inggris bukan bahasa ibu. Meski telah diberikan penjelasan oleh pemerintah, tampaknya para ulama Aceh, termasuk tokoh Uleebalang, tidak sependapat dengan maksud pemerintah Hindia Belanda tersebut. Para akademisi Aceh meyakini upaya pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya bahasa Melayu di Aceh. Akibatnya, masyarakat Aceh tidak akan bisa memahami bahasa yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi mereka, serta berhubungan dengan suku lain di sekitarnya.

Kecuali di daerah Gayo, Tamiang, dan Singkil, bahasa Aceh secara resmi diadopsi sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah umum pada 1 Juli 1932, menggantikan bahasa Melayu. Pada akhir tahun 1920, jumlah sekolah negeri di Aceh bertambah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dibalik maksud dan tujuan pihak kolonial Belanda terhadap masyarakat Aceh khususnya, yaitu untuk membebaskan rakyat Aceh dari buta huruf Latin dan juga mengisi peran pegawai rendahan di kerajaan-kerajaan pada masa itu.

Kesimpulan

Sekolah Rakyat (*Volkschool*) adalah salah satu sekolah Belanda di Aceh yang menawarkan pendidikan tiga tahun. Van Daalen, Gubernur Militer/Sipil Aceh dan daerah taklukan pada saat itu, memprakarsai pembentukan pada tanggal 30 Desember 1907. Dan sekolah desa pertama, yang semula bernama Sikula, didirikan di daerah Aceh Besar Kecamatan Ulee Lheu (sekolah). *Volkscholl* didirikan atas dasar dua faktor utama. *Pertama*, visi politik etis di mana salah satu tujuannya adalah untuk mencocokkan karyawan administrasi yang terampil dengan standar mereka. *Kedua*, munculnya kelompok baru yang meyakini bahwa perlawanan bersenjata Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda terutama dilatarbelakangi oleh sistem nilai Islam.

Sehingga para kolonial Belanda berinisiatif untuk menghasut para *Uleebalang* agar menjauh dari para pemimpin agama dan diperkenalkan sistem pendidikan Barat/Belanda. Supaya dapat mewujudkan hasrat pemerintah Hindia Belanda dalam menyebarkan pendidikan seluas mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Dan setelah mendapatkan pendidikan para masyarakat pribumi

dapat dipekerjakan oleh kolonial Belanda dengan upah yang rendah.

Proses pendidikan di sekolah *Volkschool* selama masa 3 tahun ajaran. Terdiri dari beberapa ruangan yaitu tempat anak-anak Aceh belajar. Pada umumnya merupakan membaca ialah memakai tulisan Latin dalam bahasa Aceh, menulis, dan berhitung. Adapun alat tulisnya yaitu terdiri dari Sabak (dari batu berbentuk papan tulis mini) dan Grip (alat tulis yang terbuat dari batu). Biaya sekolah yang dibebankan kepada siswa, yang harus dibayar oleh orang tua mereka, juga minim, berkisar antara 10 hingga 15 sen per tahun. Hari sekolah dimulai pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 11.00, atau paling lambat pukul 11.30 WIB, sedangkan sekolah juga tutup pada hari Jumat dan Minggu, serta hari libur besar yang ditetapkan oleh pemerintah, dan selama bulan puasa, selama sebulan penuh ditutup.

Meskipun pada awalnya masyarakat Aceh secara terpaksa menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat (*Volkschool*) yang didirikan oleh pihak Belanda, namun pada akhirnya keterpaksaan tersebut juga membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Dimana rakyat Aceh tidak lagi buta huruf Latin dan mampu melahirkan

generasi yang cerdas seperti sekarang ini.

Referensi

- Abdul Hadi. Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. 2(3):179-194. 2014.
- Abdul Kadir. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Ed 1. Jakarta: Kencana. 2012.
- Abdul Manan, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*. Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2021.
- Abdul Rani Usman. *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi, dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003.
- Abuddin Nata. 2010. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aditia Muara Padiatra. 2020. *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*. Gresik: CV. Jendela Sastra Indonesia Press.
- Agus Santoso, dkk. *Naskah Sumber Arsip Pendidikan*. Jakarta: Arsip Nasional. 2015.
- Anselmus JE Toenlio. *Teori dan Filsafat Pendidikan*. Cet.1. Malang: Penertbit Gunung Samudera. 2016.
- Badruzzaman Ismail. dkk. *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Gua Hira'. 1995.
- Bukhari Daud dan Mark Durie. *Kamus Basa Aceh, Kamus Bahasa Aceh*,

- Acehnese Indonesian English Thesaurus*. Canberra: The Australian University. 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta. 1984.
- Dwi Nurani. *Serba-Serbi Kurikulum Merdeka Kekhasan Sekolah Dasar*. Tim usat Kurikulum dan Pembelajaran: BSKAP. diakses pada 16 Juni 2022 dari situs: <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>. 2022.
- Eva Syarifah Wardah. Metode Penelitian Sejarah, (*IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang: Tsaqofah, 2014*), 12(2):163-175. 2014. Haidar Putra Daulay. *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya*. Jakarta: Kencana. 2019.
- J Kreemer. *Atjeh Algemeen Samenvattend Overzicht Van Land En Volk Van Atjeh En Onderhoorigheden*. Tweede Deel. N. V. Boekhandel En Drukkerij Voorheen E. J. Brill, Leiden. 1923.
- Kepmen No 262 Perubahan 56 Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pemulihan Pembelajaran, diakses pada tanggal 16 Juni 2022 dari situs: <https://jdih.kemdikbud.go.id>.
- Mariono dan I Made Gde Suryawan. *Materi dasar Pendidikan dan Pelatihan Mahasiswa Pecinta Alam*. Jawa Timur: Kun Fayakun. 2020
- M. Dien Madjid. *Catatan Pinggir Sejarah Aceh Perdagangan, Diplomasi, dan Perjuangan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- Mededeelingen Van Het Bureau Voor De Bestuurs Zaken Der Buitenbezittingen Bewerkt Door Het Encyclopedisch Bureau De Buitenbezittingen Deel Ii, Aflevering 2. *Atjeh En Onderhoorigheden*.
- Muhammad Anwar. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Muhammad Hasan, dkk. *Landasan Pendidikan*. Tahta Media Grup. 2021.
- Muhammad Ibrahim (Ketua), *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Aceh: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 1980/1981.
- Muhammad Umar. *Peradaban Aceh (Tamaddun) 1*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya. 2008.
- Munawiah. *Birokrasi Kolonial di Aceh (1903-1942)*. Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press. Darussalam Banda Aceh. 2007.
- Musriadi. *Profesi Kependidikan Secara Teoretis dan Aplikatif Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Nasution. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Peter Salim. *Kamus Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 2002.
- Ratih Elvikha Yulasri. 2016. Konsep Pendidikan Sebagai Suatu

Sistem dan Komponen Sistem Pendidikan. *Artikel*. Fakultas Ilmu Pendidikan: Administrasi Pendidikan.

- Redja Mudyahardjo. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Regina Ade Darman. *Telaah Kurikulum*. Guepedia. 2021.
- Rusdi Sufi, dkk. *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 1997.
- Samsul Munir Amin. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Snouck Hurgronje. C. 1906. *Orang Aceh (Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial)*. Ruslani. 2019. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sudirman, dkk. *Sejarah Demografi Aceh Utara*. (Banda Aceh: BPNB Banda Aceh Press. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research & Devolepment*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Yayah Huliatusisa. *Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar*. Jawa Barat: CV Jejak. 2022.
- Zakaria Ahmad. *Sejarah Perlawanan Aceh terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*. Aceh: Yayasan Pena. 2008.